

Laporan Kinerja

Biro Kerja Sama Luar Negeri

Tahun 2016

**Biro Kerja Sama Luar Negeri
Sekretariat Jenderal
Kementerian Kesehatan
Tahun 2017**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2016 yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan tahun pertama pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kerja Sama Luar Negeri dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Biro Kerja Sama Luar Negeri. Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016.

Secara umum capaian kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yaitu 9 dokumen kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan. Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan

peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Biro Kerja Sama Luar Negeri pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Jakarta, 31 Januari 2017

Plt. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri

drg. Murti Utami, MPH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri ini menyajikan berbagai keberhasilan atau capaian strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri selama tahun 2016. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Penetapan Kinerja.

Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja (*performance agreement*) tahun 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan realisasi. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga salah satu keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk dapat memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian sasaran, Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 memiliki satu sasaran dengan satu indikator. Realisasi target kinerja menunjukkan bahwa hasil pencapaian seluruh sasaran kegiatan Biro Kerja Sama Luar Negeri pada Tahun 2016 mencapai target yang ditetapkan (100%). Diharapkan pada tahun

mendatang dapat lebih ditingkatkan kualitas dan harus diupayakan seoptimal mungkin pencapaiannya.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 64 Tahun 2015, Pusat Kerjasama Luar Negeri mengalami perubahan nomenklatur menjadi Biro Kerja Sama Luar Negeri, sehingga sejak tahun 2016 Biro Kerja Sama Luar Negeri memiliki tugas dan fungsi yang sedikit berbeda dari Pusat Kerjasama Luar Negeri. Sejak tahun 2016 Biro Kerja Sama Luar Negeri memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama kesehatan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalankan fungsi-fungsi diantaranya adalah:

- a. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama luar negeri bilateral, regional, dan multilateral di bidang kesehatan.
- b. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan luar negeri bilateral, regional, dan multilateral di bidang kesehatan dan
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Sebagai Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, salah satu kewajiban Biro Kerja Sama Luar Negeri dalam menjalani tugas dan fungsinya sehari-hari adalah menyusun dokumen Rencana Aksi Kegiatan. Dokumen tersebut merupakan elaborasi dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan Rencana Aksi Program di Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Meskipun dokumen Rencana Aksi Kegiatan masih berupa perencanaan yang bersifat indikatif, namun beberapa bagian khususnya terkait dengan rencana aksi telah bersifat operasional, yang dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan kegiatan perencanaan dan anggaran di Biro Kerja Sama Luar Negeri selama kurun waktu tahun 2015 - 2019.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Biro Kerja Sama Luar Negeri diharapkan sebagai pintu masuk kerja sama luar negeri di Kementerian Kesehatan, dan tentunya kerja sama luar negeri diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kesehatan

sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Namun demikian dalam mengembangkan kerja sama luar negeri, juga memperhatikan kebijakan politik luar negeri dimana Kementerian Luar Negeri merupakan koordinator untuk hal tersebut. Oleh karenanya dalam setiap pengembangan kerja sama luar negeri, disamping memperhatikan kepentingan lintas unit utama di Kementerian Kesehatan, juga dibangun mekanisme forum lintas Kementerian/Lembaga, untuk mendapatkan masukan dan pandangan sehingga posisi sektor kesehatan Indonesia mendukung kepentingan nasional secara komprehensif.

Rencana strategis dan Kebijakan teknis Biro Kerja Sama Luar Negeri adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yaitu lingkungan strategis regional dan lingkungan strategis global. Pada lingkungan strategis regional berkaitan dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tanggal 1 Januari 2016 akan memberikan peluang dan akses pasar sekaligus tantangan tersendiri bagi Indonesia. Implementasi MEA yang mencakup perdagangan barang dan jasa sektor kesehatan perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan daya saing dari fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan dalam negeri. Pembenahan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada baik dari sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarannya, maupun dari segi manajemennya perlu digalakkan. Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, dan lain-lain) harus dilakukan secara serius dan terencana. Hal ini berkaitan dengan perjanjian pengakuan bersama *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* tenaga medis/dokter, dokter gigi dan perawat.

Pada Lingkungan Strategis Global berkaitan dengan berakhirnya agenda *Millennium Development Goals (MDGs)* pada tahun 2015, bahwa banyak negara mengakui keberhasilan dari MDGs sebagai pendorong tindakan-tindakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan masyarakat. Sebagai tindak lanjut, Biro Kerja Sama Luar Negeri juga mendukung kelanjutan program tersebut yang disebut dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang meliputi 17 *goals*. Terkait hal tersebut, kesehatan ada dalam *goals* no 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.

Salah satu penekanan pada SDGs adalah peningkatan *partnership* atau kemitraan dimana salah satunya adalah penguatan kemitraan Kementerian Kesehatan dengan mitra pembangunan kesehatan yang ada, diantaranya negara mitra, organisasi internasional,

NGO atau LSM dan swasta. Dalam pelaksanaannya, salah satu sarana untuk menunjukkan komitmen Kementerian Kesehatan dalam penguatan kemitraan tersebut adalah dengan membuat perjanjian kerja sama dengan mitranya.

Prioritas Biro Kerja Sama Luar Negeri yang akan dilakukan adalah mempercepat penyelesaian perjanjian kerja sama ke arah perjanjian yang diimplementasikan, sehingga hasil kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan mitranya segera dapat dirasakan masyarakat Indonesia.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 :

1. Memberikan informasi kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri yang terukur kepada stakeholder (pemberi mandat) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Kerja Sama Luar Negeri untuk meningkatkan kinerjanya.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pada Bagian Ketujuh Peraturan Menteri Kesehatan No. 64 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, telah diatur tugas dan fungsi masing-masing bagian yang ada di Biro Kerja Sama Luar Negeri. Berikut tugas dan fungsi masing-masing bagian :

1. Bagian Kerja Sama Kesehatan Bilateral

Tugas :

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar negeri bilateral serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama kesehatan bilateral di Kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, Amerika, Eropa dan Afrika.
- b. koordinasi dan fasilitasi hubungan luar negeri bilateral di Kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, Amerika, Eropa dan Afrika.
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

2. Bagian Kerja Sama Kesehatan Regional

Tugas :

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar negeri regional.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama kesehatan regional dengan negara ASEAN dan Non-ASEAN.
- b. koordinasi dan fasilitasi hubungan luar negeri regional dengan negara ASEAN dan Non-ASEAN.

3. Bagian Kerja Sama Kesehatan Multilateral

Tugas :

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar negeri multilateral.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama kesehatan multilateral dengan badan PBB dan Non-PBB.
- b. koordinasi dan fasilitasi hubungan luar negeri multilateral dengan badan PBB dan Non-PBB.

Berikut Struktur Organisasi Biro Kerja Sama Luar Negeri sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 64 Tahun 2015.



Gambar 1
Struktur Organisasi
Biro Kerja Sama Luar Negeri
Tahun 2016

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja ini disusun dengan sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan secara ringkas latar belakang, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan sistematika penyajian.

BAB II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2015 dan sumber daya manusia yang dimiliki.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Sumber Daya Manusia

Pada sub bab ini diuraikan keadaan sumber daya manusia yang ada di Biro Kerja Sama Luar Negeri.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini diuraikan output kegiatan kerja sama luar negeri.

BAB IV – PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Perencanaan kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri dilakukan dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan strategis pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan perencanaan strategis di Kementerian Kesehatan melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 kemudian dijabarkan pada Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro Kerja Sama Luar Negeri dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan melalui Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Biro Kerja Sama Luar Negeri menjadi salah satu kegiatan dari **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**. Adapun sarasannya adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Kerja Sama Luar Negeri adalah **Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri** dengan outputnya adalah meningkatnya peran dan posisi Indonesia dalam kerja sama luar negeri di bidang kesehatan. Adapun Indikator pencapaian output tersebut pada tahun 2016 adalah jumlah implementasi dari kesepakatan kerja sama luar negeri bidang kesehatan sebanyak 9 dokumen.

Kesepakatan kerja sama luar negeri bidang kesehatan adalah “jumlah kesepakatan internasional yang telah ditandatangani termasuk kesepakatan dalam persidangan internasional yang bersifat pemerintahan dan telah diimplementasikan oleh Kementerian Kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kesehatan yang diukur dengan pelaporan monev secara berkala dan komprehensif”.

Kerja sama luar negeri bidang kesehatan senantiasa dikembangkan dengan memperhatikan prioritas pembangunan kesehatan dan juga kebijakan politik luar negeri dan hubungan luar negeri melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Selain itu dalam kerangka globalisasi perdagangan di WTO dan Free Trade Area lainnya, perdagangan barang/jasa/hak kekayaan intelektual sektor kesehatan merupakan salah satu primadona, dan Biro Kerja Sama Luar Negeri senantiasa mengikuti mekanisme interkementerian dibawah koordinasi Kementerian Perdagangan.

Untuk mendukung pencapaian output, Biro Kerja Sama Luar Negeri yaitu meningkatnya peran dan posisi Indonesia dalam kerja sama luar negeri di bidang kesehatan, dengan indikator kinerja kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan (yang diimplemetasikan), perlu dilakukan upaya, yaitu :

1. Peningkatan Kerja Sama Kesehatan Bilateral

Peningkatan kerja sama bilateral bidang kesehatan ditujukan untuk mendukung program prioritas di Kementerian Kesehatan. Kerja sama bilateral memperhatikan kepentingan nasional Indonesia, yaitu kepentingan secara politik, ekonomi dan sosial budaya. Pelaksanaan kerja sama bilateral, disesuaikan dengan prinsip perjanjian internasional dengan memperhatikan kepentingan politik luar negeri Indonesia serta senantiasa berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri,.

Biro Kerja Sama Luar Negeri berperan sebagai pintu masuk kerja sama bilateral di Kementerian Kesehatan, mengkoordinasikan dan melakukan fasilitasi terhadap setiap usulan kerja sama bilateral yang disampaikan oleh unit utama Kementerian Kesehatan, termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kantor Daerah yang menjadi Satuan Kerja (Satker) berada langsung di bawah Kementerian Kesehatan.

Kerja sama bilateral dengan negara sahabat difokuskan kepada implementasi perjanjian internasional secara bilateral yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, sambil menjajaki peluang kerja sama bilateral lainnya dalam rangka mendukung kepentingan nasional dan kepentingan Kementerian Kesehatan. Perjanjian kerja sama dapat dilakukan dalam kerangka perjanjian payung yang ditandatangani oleh Kementerian Luar Negeri, dan atau kerjasama bilateral kesehatan yang berdiri sendiri setelah mendapatkan kuasa penuh dari Menteri Luar Negeri. Namun demikian, setiap upaya dalam melakukan kerja sama bilateral bidang kesehatan senantiasa berkoordinasi

dengan Kementerian Luar Negeri dan lintas Kementerian/Lembaga lainnya dalam forum inter kementerian.

Beberapa negara yang telah terjalin kerja sama bilateral yaitu dengan negara Amerika Serikat, Singapura, Timor Leste, Malaysia, Brunai Darussalam, Mesir, Sudan, Iran, Saudi Arabia, Australia, Jerman, RRC, Cuba, Meksiko, Rusia, Jepang, Vietnam, Palestina.

Rencana kegiatan kerja sama kesehatan bilateral antara lain :

- a. Penyusunan draft/counter draft perjanjian internasional kerja sama bilateral
- b. Koordinasi dengan lintas unit utama dalam menentukan substansi kerja sama
- c. Koordinasi dengan lintas Kementerian/Lembaga dalam penyusunan perjanjian internasional
- d. Penyusunan kertas posisi
- e. Penyusunan telaah pimpinan
- f. Penyiapan kertas posisi delegasi dan Statement Delegasi
- g. Persiapan posisi Kementerian Kesehatan pada berbagai Sidang Komisi Bersama dan Kunjungan Kerja Menteri dan Pimpinan lainnya
- h. Penyiapan bahan masukan untuk Kunjungan Presiden RI keluar negeri dan kunjungan kerja Kepala Pemerintahan negara asing ke Indonesia;
- i. Fasilitasi penandatanganan perjanjian internasional kerja sama bilateral
- j. Persiapan penyelenggaraan dan pelaporan pertemuan bilateral dengan negara sahabat, pelaksanaan Sidang Komisi Bersama dan forum perundingan bilateral lainnya
- k. Dokumentasi implementasi perjanjian internasional kerja sama bilateral
- l. Pemantauan dan evaluasi implementasi perjanjian internasional kerja sama bilateral
- m. Penyusunan analisis implementasi perjanjian internasional kerja sama bilateral
- n. Melakukan negosiasi dan focal point bagi kerja sama dengan berbagai organisasi kesehatan dalam kerangka kerja sama bilateral.

2. Peningkatan Kerja Sama Kesehatan Regional

Kerja sama luar negeri bidang kesehatan di ASEAN merupakan barometer diplomasi. Kementerian Kesehatan saat ini terlibat secara langsung dalam pencapaian komunitas ASEAN 2015 melalui dua pilar utama, yaitu pilar ASEAN Sosio Cultural Community (ASCC) dan pilar ASEAN Economic Community (AEC). Peran Kementerian Kesehatan

di ASCC antara lain mengimplementasikan Rencana Strategis Kesehatan di ASEAN atau disebut juga *ASEAN Strategic Plan on Health Development*. Merujuk dokumen tersebut, Indonesia mendapat mandat menjadi *lead county* beberapa isu kesehatan. Beberapa sidang di ASEAN yang sifatnya governing adalah *AHMM / ASEAN Health Ministerial Meeting*, *SOMHD / ASEAN Senior Official Meeting on Health Development*, *Working Groups (WG) / Task Forces (TF)*.

Disamping ASEAN secara regional juga dikembangkan kerja sama sub regional ASEAN yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Indonesia dalam forum BIMST (Brunai, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand). Pertemuan dilakukan secara reguler setiap tahun untuk membahas isu kesehatan di daerah perbatasan dan isu kesehatan terkait mobilitas penduduk lintas batas, dan isu lainnya yang menjadi *concern* para pihak.

Dalam kerjasama ekonomi sektor kesehatan kepentingan nasional Indonesia dinegosiasikan melalui forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Kerja sama kesehatan di APEC dibahas dalam forum ***Health Working Group/HWG***, dan ***LSIF (Life Science and Innovative Forum)***.

Rencana kegiatan kerja sama kesehatan regional antara lain :

- a. Penyusunan draft/counter draft perjanjian internasional kerja sama regional
- b. Koordinasi dengan lintas unit utama dalam menentukan substansi kerja sama
- c. Koordinasi dengan lintas Kementerian/Lembaga dalam penyusunan perjanjian internasional
- d. Fasilitasi penandatanganan perjanjian internasional kerja sama regional
- e. Penyusunan telaah pimpinan untuk memberikan rekomendasi kebijakan posisi Indonesia terhadap berbagai isu dan agenda kesehatan global pada berbagai pertemuan regional yang sifatnya mengikat dan pertemuan negosiasi antara pemerintah
- f. Penyiapan kertas posisi delegasi dan Statement Delegasi
- g. Persiapan posisi Kementerian Kesehatan pada sidang ASEAN, APEC, WHO-SEARO, BIMST, FPGH dan sidang regional lainnya, baik pada sidang Konferensi Tingkat Menteri, *Senior Official Meeting (SOM)* maupun *working group/task force*
- h. Penyiapan bahan masukan untuk Pertemuan KTT/KTM ASEAN dan KTT/KTM APEC

- i. Memberikan rekomendasi kebijakan posisi Indonesia terhadap berbagai isu dan agenda pertemuan dan perundingan di berbagai forum internasional
- j. Penyiapan bahan masukan untuk Kunjungan Presiden RI keluar negeri dan kunjungan kerja Kepala Pemerintahan negara asing ke Indonesia dalam kerangka kerja sama regional
- k. Penyelenggaraan pertemuan internasional secara regional
- l. Dokumentasi implementasi perjanjian internasional kerja sama regional
- m. Pemantauan dan evaluasi implementasi perjanjian internasional kerja sama regional
- n. Penyusunan analisis implementasi perjanjian internasional kerja sama regional

3. Peningkatan Kerja Sama Kesehatan Multilateral

Kementerian Kesehatan diharapkan meningkatkan perannya dalam menggalang *Global Health Diplomacy*, khususnya terkait dengan isu kesehatan yang menjadi *Concern Developing Countries (DCs)* dan *Least Developing Countries (LDCs)*, termasuk kepentingan dalam negeri Indonesia khususnya terkait pencapaian delapan program prioritas. Indonesia melalui berbagai forum diharapkan dapat melakukan lobby untuk melakukan reformasi di WHO dan lembaga PBB lainnya yang terkait dengan isu kesehatan global sehingga lebih berkeadilan, setara, dan menguntungkan semua pihak, khususnya terkait dengan kepentingan DCs dan LDCs. Keberhasilan Indonesia dengan diadopsinya "*The Framework for Pandemic Influenza Preparedness: Sharing of Influenza Viruses and Acces to Vaccines and other Benefit*" sebagai resolusi WHA pada tahun 2011, merupakan titik tolak pengembangan diplomasi Indonesia ditingkat multilateral. Dalam mendukung posisi Indonesia perlu dilakukan lobi dengan negara sahabat melalui forum FPGH, Selatan-Selatan, ASEAN, WHO SEARO, OKI, dan *like minded countries* lainnya.

Dalam kerangka *Global Health Diplomacy*, dimana isu kesehatan telah menjadi salah satu alat diplomasi luar negeri Indonesia, telah dikembangkan kerja sama melalui forum *Foreign Policy Global Health (FPGH)* yang beranggotakan Indonesia, Thailand, Prancis, Norwegia, Afrika Selatan, Senegal, dan Brazil.

Dalam mengimplementasikan resolusi dan deklarasi WHO serta permasalahan kesehatan di tingkat regional, Kementerian Kesehatan menjadi members dari WHO Regional South East Asian Region Organization (SEARO) yang beranggotakan

sebelas negara yaitu Indonesia, Thailand, Myanmar, India, Bangladesh, Timor Leste, PDR Korea, Bhutan, Maldives, Srilanka, dan Nepal. WHO SEARO merupakan mitra strategis Kementerian Kesehatan, khususnya terkait dengan dukungan kerjasama teknis (termasuk tenaga ahli kesehatan) dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang menjadi perhatian dunia dan permasalahan kesehatan dikawasan regional. Pertemuan di WHO SEARO yang sifatnya mengikat yaitu ***SPPDM /High Level Preparatory Meeting at Regional Level/SEARO, Health Ministerial Meeting (HMM) WHO SEARO dan Regional Committee Meeting (RCM) WHO SEARO.***

Rencana kegiatan kerja sama kesehatan multilateral antara lain :

- a. Penyusunan *draft/counter draft* perjanjian internasional kerja sama multilateral, dan UN bodies lainnya
- b. Koordinasi dengan lintas unit utama dalam menentukan substansi kerja sama
- c. Koordinasi dengan lintas Kementerian/Lembaga dalam penyusunan perjanjian internasional
- d. Fasilitasi penandatanganan perjanjian internasional kerjasama multilateral
- e. Penyusunan telaah pimpinan untuk memberikan rekomendasi kebijakan posisi Indonesia terhadap berbagai isu dan agenda kesehatan global pada berbagai pertemuan regional yang sifatnya mengikat dan pertemuan negosiasi antara pemerintah
- f. Penyiapan kertas posisi delegasi dan statement delegasi
- g. Persiapan posisi Kementerian Kesehatan pada sidang WHA, EB, UNGA sektor kesehatan, RC WHO-SEARO, dan sidang multilateral lainnya, baik pada sidang Konferensi Tingkat Menteri, *Senior Official Meeting (SOM)* maupun *working group/task force*
- h. Penyiapan bahan masukan untuk Pertemuan KTT/KTM multilateral
- i. Memberikan rekomendasi kebijakan posisi Indonesia terhadap berbagai isu dan agenda pertemuan dan perundingan di berbagai forum internasional.
- j. Penyiapan bahan masukan untuk Kunjungan Presiden RI keluar negeri dan kunjungan kerja Kepala Pemerintahan negara asing ke Indonesia dalam kerangka kerja sama multilateral
- k. Penyelenggaraan pertemuan internasional secara multilateral atau regional SEARO
- l. Dokumentasi implementasi perjanjian internasional kerja sama multilateral
- m. Pemantauan dan evaluasi implementasi perjanjian internasional kerja sama multilateral

- n. Penyusunan analisis implementasi perjanjian internasional kerja sama multilateral

4. Fasilitasi Globalisasi Perdagangan Sektor Kesehatan dan Kerjasama Ekonomi Lainnya

Kementerian Kesehatan juga berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah dibawah koordinasi Kementerian Perdagangan dalam pengembangan kerjasama ekonomi sektor kesehatan baik dalam kerangka perdagangan barang sektor kesehatan, jasa kesehatan, investasi, maupun hak kekayaan intelektual. Pengembangan kerja sama perdagangan internasional sektor kesehatan dilakukan secara *multitrack* melalui kerja sama multilateral di WTO, regional, dan bilateral.

Kerja sama aliran bebas perdagangan sektor kesehatan dalam kerangka ASEAN Free Trade Area (AFTA) ditujukan untuk mewujudkan ASEAN Economic Community Tahun 2016. Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk berperan aktif dalam setiap perundingan perdagangan barang dan jasa kesehatan, termasuk investasi sektor kesehatan. Selain itu ASEAN dalam juga mengembangkan kerja sama dengan negara mitra wicara mempunyai Free Trade Area dalam kerangka ASEAN Free Trade Area. Kerja sama kesehatan di ASEAN senantiasa memperhatikan dinamika kebijakan kesehatan dalam negeri, tetapi disisi lain kebijakan dalam negeri diharapkan menyesuaikan kebijakan dalam negerinya sesuai dengan dinamika dalam rangka pembentukan ASEAN *Single Window*.

Rencana kegiatan kerja sama globalisasi perdagangan sektor antara lain :

- a. Memberi masukan atas draft/counter draft perjanjian internasional globalisasi perdagangan sektor kesehatan di WTO, ASEAN dan Free Trade Area lainnya
- b. Koordinasi dengan lintas unit utama dalam menentukan substansi kerja sama
- c. Koordinasi dengan lintas Kementerian/Lembaga dalam penyusunan perjanjian internasional dan penandatanganan perjanjian internasional
- d. Penyusunan telaah pimpinan untuk memberikan rekomendasi kebijakan posisi Indonesia terhadap berbagai isu perdagangan barang sesuai prinsip GATT, perdagangan jasa sesuai prinsip GATS, dan perdagangan Hak Kekayaan Intelektual sesuai prinsip TRIPS, serta mendukung kepentingan nasional dan kepentingan Kementerian Kesehatan pada berbagai pertemuan multilateral, regional, maupun bilateral

- e. Penyiapan kertas posisi delegasi dan statement delegasi
- f. Persiapan posisi Kementerian Kesehatan pada sidang WTO (terkait dengan GATT, GATS, dan TRIPS), siding di ASEAN (terkait dengan ATIGA, AFAS, RCEP, ACIA), dan siding bilateral lainnya baik pada sidang Konferensi Tingkat Menteri, *Senior Official Meeting* (SOM) maupun *working group/task force*
- g. Penyiapan bahan masukan untuk pertemuan KTT/KTM multilateral
- h. Memberikan rekomendasi kebijakan posisi Indonesia terhadap berbagai isu dan agenda pertemuan dan perundingan di berbagai forum internasional.
- i. Penyelenggaraan pertemuan internasional dalam kerangka globalisasi perdagangan sektor jasa kesehatan
- j. Dokumentasi implementasi perjanjian internasional dalam kerangka globalisasi perdagangan sektor kesehatan
- k. Pemantauan dan evaluasi implementasi perjanjian internasional kerja sama globalisasi perdagangan sektor kesehatan
- l. Penyusunan analisis implementasi perjanjian internasional kerja sama globalisasi perdagangan sektor kesehatan

5. Administrasi Takakes dan Hubungan Luar Negeri, serta Fasilitas Pinjaman Hibah Luar Negeri

Untuk mendukung tertib administrasi hubungan luar negeri di Kementerian Kesehatan, dan fungsi Biro Kerja Sama Luar Negeri sebagai pintu masuk kerja sama internasional, maka diperlukan fasilitasi administrasi hubungan luar negeri termasuk Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). Hal ini menjadi strategis seiring dengan berkembangnya dinamika kerja sama internasional sehingga diperlukan koordinasi lintas unit utama di Kementerian Kesehatan, dibawah koordinasi dan fasilitasi Biro Kerja Sama Luar Negeri. Namun demikian dengan pertimbangan keterbatasan sumberdaya dan pertimbangan tugas pokok dan fungsi maka pengelolaan administrasi hubungan luar negeri dan PHLN dilakukan dalam ruang lingkup yang terbatas.

Rencana kegiatan kerja sama kesehatan di bidang administrasi takakes dan hubungan luar negeri antara lain :

- a. Koordinasi dengan lintas unit utama dalam menentukan substansi kerja sama
- b. Koordinasi dengan lintas Kementerian/Lembaga dalam penyusunan perjanjian internasional dan penandatanganan perjanjian internasional

- c. Melakukan Fasilitasi dan pendampingan kunjungan tamu asing di Kementerian Kesehatan RI
- d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan administrasi penugasan dan perpanjangan tenaga kerja dan konsultan asing kesehatan asing di lingkungan Kementerian Kesehatan
- e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan administrasi perjalanan dinas luar negeri pusat
- f. Melakukan pelaksanaan penyiapan administrasi training dan beasiswa donor asing bagi pejabat/staf dilingkungan Kementerian Kesehatan
- g. Administrasi persuratan berbagai pertemuan WHO di Indonesia
- h. Melakukan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pertemuan Internasional lainnya termasuk Implementasi Kerja Sama Teknik (KST) dalam kerangka bilateral, Selatan-Selatan, Kerjasama Teknik antar Negara Berkembang (KTNB), Internasional NGO (INGO) dan kerangka kerjasama lainnya
- i. Fasilitasi penyusunan perjanjian kerjasama PHLN,
- j. Menyelenggarakan pertemuan koordinasi melalui melalui forum internal Kementerian Kesehatan maupun forum inter Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan AHLN, kerjasama teknik, maupun PHLN.
- k. Pengelolaan administrasi pinjaman dan hibah luar negeri, antara lain registrasi hibah luar negeri
- l. Pemantauan dan evaluasi AHLN, kerjasama teknik, maupun PHLN
- m. Penyusunan analisis implementasi AHLN, kerjasama teknik, maupun PHLN
- n. Memberikan rekomendasi kebijakan posisi Indonesia terhadap berbagai isu AHLN, kerjasama teknik, maupun PHLN
- o. Penyelenggaraan pertemuan internasional dalam kerangka AHLN, kerjasama teknik, maupun PHLN

6. Penguatan reformasi birokrasi

Bahwa dalam pengembangan kelima rencana aksi tersebut di atas perlu didukung oleh sumberdaya manusia yang kompeten dan handal, serta input sumberdaya lainnya sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk itu perlu diciptakan budaya organisasi yang berorientasi global sesuai dengan semangat reformasi birokrasi di Kementerian Kesehatan.

Rencana kegiatan penguatan reformasi birokrasi antara lain :

- a. Penyusunan dokumen delapan area perubahan reformasi birokrasi
- b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perubahan pada delapan area perubahan
- c. Perbaikan kualitas manajemen perbendaharaan dan pelaporan keuangan
- d. Peningkatan kualitas SDM kesehatan sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan budaya kerja berorientasi mutu
- e. Peningkatan kepuasan pelanggan di dalam dan di luar Biro Kerja Sama Luar Negeri
- f. Sosialisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Biro Kerja Sama Luar Negeri

Penjabaran pencapaian target kinerja dan pagu alokasi anggaran per tahun disajikan pada matriks di bawah ini :

Tabel 1
Rencana Kinerja dan Alokasi Pagu Indikatif
Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2015-2019

Kegiatan	Output	Indikator	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri	Meningkatnya peran dan posisi Indonesia dalam kerja sama luar negeri bidang kesehatan	Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan					
		Target :	8	9	8	7	8
Pagu Anggaran (Rp. Miliar)							
Pagu Indikatif			20.0	23.5	21.0	18.5	21.0
Pagu Definitif			20.0				
Pagu Anggaran			12.1				

Sesuai dengan RKP Tahun 2015, serta sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Kepmenkes No. HK.02.02/MENKES/52/2015), target kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri sampai dengan Tahun 2019 ditetapkan sejumlah 40 dokumen kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan, yang hingga saat ini sudah mencapai 17 (tujuh belas) dokumen.

Perencanaan kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 selanjutnya diuraikan menjadi dua dokumen yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016, dan Penetapan Kinerja (Tapja) Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016.

Tabel 2
Rencana Kinerja Tahunan
Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2016

No	Sasaran Strategis/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya peran dan posisi Indonesia dalam kerja sama luar negeri di bidang kesehatan/Peningkatan kerja sama luar negeri	Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan	9 Dokumen

Target RKT Biro Kerja Sama Luar Negeri tersebut, ditujukan untuk meningkatnya peran dan posisi Indonesia dalam kerja sama luar negeri di bidang kesehatan, dan mendukung kinerja program dukungan manajemen dan teknis lainnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka komitmen RKT tersebut di atas, diperkuat dengan perjanjian kinerja melalui penetapan kinerja tahunan, dengan melakukan penandatanganan dokumen antara Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan pada awal tahun 2016. Adapun penetapan kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri pada tahun 2016, sebagai berikut :

Tabel 3
Penetapan Kinerja
Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2016

No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama luar negeri di bidang kesehatan/Peningkatan kerja sama luar negeri	Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan	9 Dokumen

Jumlah Anggaran

Kegiatan Peningkatan Kerjasama Luar Negeri : Rp. 19.547.063.000,-

Selanjutnya dokumen RKT dan Tapja tersebut di atas, diinternalisasi secara berjenjang kepada pejabat eselon III, pejabat eselon IV, dan seterusnya kepada seluruh staf di Biro Kerja Sama Luar Negeri. Kedua dokumen dimaksud merupakan target kinerja yang menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan kegiatan di Biro Kerja Sama Luar Negeri, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan bersumber DIPA Biro Kerja Sama Luar Negeri TA 2016. Dokumen dimaksud juga merupakan rujukan target kinerja di Biro Kerja Sama Luar Negeri, yang pencapaiannya diukur melalui evaluasi kinerja secara triwulan.

Pengembangan kerja sama luar negeri bidang kesehatan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Kementerian Kesehatan yang ke-7, yaitu “Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri”, dengan memperhatikan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, serta Tujuan Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019.

Adapun Visi Presiden Republik Indonesia adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu :

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 (sembilan) agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 – 2019, yaitu

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya daya tangkap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap resiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan yaitu :

1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit

3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan
6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan
10. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan
12. Meningkatnya sistem informasi kesehatan integrasi

B. SUMBER DAYA

Pada tahun 2016, jumlah pegawai di Pusat Kerjasama Luar Negeri adalah sebanyak 50 pegawai, dengan jumlah komposisi 11 pegawai pada jabatan struktural dan 39 pegawai pada jabatan fungsional umum (jabatan pelaksana). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Kerjasama Luar Negeri didukung oleh pegawai-pegawai dari berbagai jenjang pendidikan, diantaranya 36% berasal dari pendidikan S2, 54% dari pendidikan S1, 6% dari pendidikan D3, dan 4% dari pendidikan SMA.

Dalam memenuhi kebutuhan jumlah pegawai sesuai dengan analisis beban kerja, Biro Kerja Sama Luar Negeri menerima penambahan pegawai baru melalui jalur penerimaan umum Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kesehatan, sehingga pada tahun 2014 Pusat Kerjasama Luar Negeri menerima 5 (lima) CPNS dengan latar belakang pendidikan Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Komputer. Untuk tahun 2015 Pusat Kerjasama Luar Negeri menerima 3 (tiga) CPNS dengan latar belakang pendidikan Hubungan Internasional.

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai dalam rangka manajemen sumber daya manusia dilakukan Pusat Kerjasama Luar Negeri dalam bentuk pemberian ijin pegawai untuk melaksanakan tugas belajar (tubel), yang dipertimbangkan dengan selektif sesuai dengan kompetensi dan masa kerja pegawai. Tercatat pada tahun 2014 sejumlah 3 (tiga) pegawai menjalankan tugas belajar di luar negeri, dan 1 (satu) pegawai yang menjalankan tugas belajar di dalam negeri. Sumber pendanaan terkait penguatan sumber daya manusia dalam bentuk tugas belajar tersebut berasal dari beasiswa *Australia Awards*

Scholarship (AAS) dan beasiswa Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Kementerian Kesehatan.

Dengan adanya perubahan nomenklatur Pusat Kerjasama Luar Negeri menjadi Biro Kerja Sama Luar Negeri pada awal tahun 2016, hal tersebut tidak merubah peta kepegawaian secara signifikan, hanya mengalami sedikit penyesuaian dalam penempatan pegawai ke dalam subbagian-subbagian baru sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja baru Kementerian Kesehatan khususnya pada Biro Kerja Sama Luar Negeri serta perubahan nama beberapa pejabat struktural.

Berikut matriks keadaan pegawai Biro Kerja Sama Luar Negeri dalam kurun waktu 2013-2016:

Tahun	Jumlah Pegawai				Pendidikan				Pegawai Berhenti/ Pindah	CPNS	Pegawai TUBEL
	Struktural		Pelaksana		S2	S1	D3	SMA			
	L	P	L	P							
Pusat Kerja sama Luar Negeri											
2013	4	7	12	27	16	29	3	2			1
2014	3	8	15	24	19	27	2	2		5	3
2015	3	8	15	24	19	27	2	2	1	3	
Biro Kerja Sama Luar Negeri											
2016	5	6	14	23	19	25	2	2	2		5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan tahun pertama diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Pusat Kerjasama Luar Negeri berganti nama menjadi Biro Kerja Sama Luar Negeri dengan Struktur Organisasi dan fungsinya sesuai dengan PMK Nomor 64/2015 tersebut. Biro Kerja Sama Luar Negeri melaksanakan kegiatan Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri dengan sasaran meningkatnya peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama luar negeri di bidang kesehatan.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Biro Kerja Sama Luar Negeri melaksanakan misi pembangunan nomor 3 dari 7 misi pembangunan sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Presiden yaitu “mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritime”. Kegiatan Biro Kerja Sama Luar Negeri masuk ke dalam Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan nomor 7 dari 12 Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan yaitu “meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri, dengan sasaran yang akan dicapai adalah 40 dokumen pada akhir tahun 2019”.

Wujud dari pelaksanaan misi pembangunan Presiden dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan tersebut, dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Biro Kerja Sama Luar Negeri (BKSLN) Tahun 2016, sebagaimana dijelaskan pada Bab II, target kinerjanya adalah 9 dokumen kesepakatan kerja sama luar negeri bidang kesehatan. Hasil yang dicapai sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 8 dokumen atau 100% dari target.

Adapun hasil dari pengukuran kinerja BKSLN pada tahun 2016 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5
Pengukuran Kinerja
Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2016

No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya peran dan posisi Indonesia dalam kerja sama luar negeri di bidang kesehatan /Peningkatan kerja sama luar negeri	Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan	9 Dokumen	9 Dokumen	100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 (Awal)	: Rp. 19.547.063.000
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 (Revisi Akhir)	: Rp. 14.107.888.000
Jumlah Anggaran Self Blocking	: Rp. 3.738.225.000
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016	: Rp. 9.029.049.328

Berdasarkan tabel tersebut di atas, pada tahun 2016 telah dihasilkan 9 dokumen kesepakatan kerja sama luar negeri bidang kesehatan. Adapun rincian 9 dokumen tersebut disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 6
Capaian Kinerja
Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2016

No.	Nama Output	Target	Capaian	%	Keterangan
1	Kesepakatan kerja sama luar negeri bilateral bidang kesehatan (Dokumen implementasi)	4	4	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pengaturan Pelaksanaan Penelitian Penyakit Menular RI-AS/IA NIH RI – USA 2. <i>Individual Arrangement (IA) Assistance Agreement</i> No. 497-AA-030 (AA 030) RI-USAID 3. MoU Kerja Sama Kementerian Kesehatan RI - INGO AIDS Healthcare Foundation (AHF) 4. MoU Kerja Sama Kementerian Kesehatan RI – INGO Hellen Keller International (HKI)
2	Kesepakatan kerja sama luar negeri regional bidang kesehatan (Dokumen kesepakatan)	3	3	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Workplan The 2nd Meeting of ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle</i> 2. <i>The 85th Meeting of the ASEAN Coordinating Committee on Services and other Related Meetings</i> 3. Rangkaian <i>Third Senior Officials' Meeting (SOM-3) APEC 2016</i>
3	Kesepakatan kerja sama luar negeri multilateral bidang kesehatan (Dokumen kesepakatan)	2	2	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resolusi <i>World Health Assembly of the World Health Organization ke-69</i> 2. Jakarta Call for Action GHSA
Total		9	9	100%	

Berikut rincian capaian kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 :

A. Kesepakatan kerja sama luar negeri bilateral bidang kesehatan

1. Penandatanganan Dokumen Pengaturan Pelaksanaan Penelitian Penyakit Menular RI-AS/IA NIH RI – USA

Dokumen IA NIH antara Litbang Kemkes Indonesia dan Litbang Kemkes Amerika Serikat telah ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2016. Kerjasama yang tertuang dalam IA NIH RI-AS adalah:

- a. Kerjasama penelitian untuk penyakit infeksi di Indonesia
- b. Penyediaan data epidemi dan klinis untuk peningkatan manajemen klinis dan kebijakan kesehatan
- c. Penguatan kapasitas penelitian dan jaringan terkait penyakit infeksi
- d. Membangun tempat penyimpanan spesimen biologi di Indonesia untuk study di masa depan.

2. Penandatanganan Individual Arrangement (IA) Assistance Agreement No. 497-AA-030 (AA 030) RI-USAID tanggal 30 September 2016

Individual Arrangement (IA) Assistance Agreement No.497-AA-030 (AA 030) RI-USAID telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes dan *Country Director* USAID pada hari Jumat, 30 September 2016.

Proyek kerja sama Kemenkes RI dengan USAID yang tercantum dalam IA dimaksud adalah *Challenge TB*, *DELIVER*, *Linkages Across the Continuum of HIV Services for Key Populations Affected by HIV (LINKAGES)*, *Delivering Expanded Resources for AIDS Programing (DERAP)*, *Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS)*, *ENVISION: Control and Elimination of Targeted Neglected Tropical Diseases (NTD)*, *Implementation Research for Universal Health Coverage (IRforUHC)*, *Community Empowerment of People Against Tuberculosis (CEPAT)–LKNU*, *CEPAT–JKM*, *CEPAT–RCD*, *Hospital Accreditation Process and Impact Evaluation (HAPIE)*, *Kajian Sektor Swasta, CSO dan Media*, *Maternal and Newborn Health Evidence Summit*, *Kegiatan Pembiayaan Kesehatan*, dan *Health Technical Assistance Project (BANTU)*.

3. MoU Kerjasama Kemenkes RI dengan AIDS Healthcare Foundation (AHF)

MoU Kemenkes RI – AHF telah ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2016 dengan masa berlaku MoU selama 3 tahun. Adapun ruang lingkup kerjasama MoU

tersebut yaitu program peningkatan pencegahan dan pengendalian *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV AIDS) dan penyakit infeksi menular seksual (PIMS) di Indonesia. Unit kerja di Kemenkes yang ditunjuk sebagai mitra kerja AHF adalah Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML).

4. Protokol Perubahan MoU Kerja Sama Kemenkes RI dengan Helen Keller International (HKI)

Protokol perubahan MoU Kemenkes RI – HKI telah ditandatangani pada 4 Maret 2016 dengan wilayah kerjasama mencakup penyelenggaraan program gizi dan pencegahan kebutaan yang meliputi 5 propinsi di Indonesia yaitu Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan.

B. Kesepakatan kerja sama luar negeri regional bidang kesehatan

1. Pertemuan *The 2nd Meeting of ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle*

Pertemuan *The 2nd Meeting of ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle* telah dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 6-8 Desember 2016. Pertemuan dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes dan dihadiri oleh *Health Cluster Coordinator* dan *Focal Point Working Group* dari seluruh negara ASEAN, serta Sekretariat ASEAN.

Bertindak sebagai *Chair of the Meeting*, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mewakili Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat. Delri dipimpin oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Anggota Delri meliputi perwakilan dari *Focal Point ASEAN Health Cluster 1*, yaitu Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olah Raga, Direktorat Kesehatan Keluarga, Direktorat Kesehatan Jiwa, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Biro KSLN, serta dibantu oleh Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN, Kemlu dan PTRI ASEAN Kemlu.

Pertemuan bertujuan untuk merevisi *draft work plan* sesuai dengan rekomendasi/guidance *The 11th Meeting of ASEAN Senior Officials Meeting on Health Development (SOMHD)*. Dokumen **Work Plan ASEAN Health Cluster 1**, antara lain memuat **regional strategy, target, proposed activities** dan **expected output** beserta **indikator** untuk masing-masing **health priority** selama **periode 2016-2020**.

Output pertemuan berupa *Draft Work Plan ASEAN Health Cluster 1* yang selanjutnya akan dilaporkan dan disahkan pada pertemuan SOMHD ke-12 di Brunei Darussalam yang akan dilaksanakan pada bulan April 2017. Dalam *draft work plan* dimaksud, terdapat beberapa *activities/strategies* yang di-lead oleh Indonesia, yaitu :

- a. *Health Priority 1: Prevention and Control of NCDs*
 - *Establish framework for the fiscal measure for sugar sweetened beverages and regulation for salt (sodium). Indonesia take a lead on salt.*
- b. *Health Priority 5: Promotion of mental health*
 - *Develop regional guidelines and program for the integration of mental health promotion and provision of services in Primary and Secondary Levels of care.*
 - *Develop and implement appropriate instrument for early detection of mental health issues and concerns (e.g. provision of Mobile Mental Health Services).*
 - *Public campaign for mental health awareness in commemoration of World Mental Health Day.*

Pertemuan **menyepakati Strategy Cluster 1** dan **health priority regional strategy** sebagai berikut:

Cluster Strategy: Strengthen capability, capacity, advocacy, and leadership in addressing risk factors and their related diseases, and other relevant conditions affecting the health of the ASEAN people by promoting healthy lifestyles throughout the life course.

Health Priority Regional Strategy /Sub-strategies:

- a. *Strengthen capacity, and capability in promoting healthy lifestyle, mental health, preventing injury, active ageing and reducing risk factors which include*

tobacco, alcohol, physical inactivity, unhealthy diet, malnutrition, and hazards at workplace;

- b. Promote cost effective intervention packages for NCD and conditions related to risk factors;*
- c. Strengthen advocacy, networking, and sharing of information/good practices/experiences among AMS in reducing risk factors for various age groups and settings;*
- d. Develop strong monitoring and evaluation mechanism on the implementation of the regional strategies in promoting healthy lifestyle.*

2. Rangkaian Pertemuan ASEAN Coordinating Committee on Services Ke-85

Rangkaian Pertemuan *ASEAN Coordinating Committee on Services* (CCS) ke-85, telah diselenggarakan di **Ho Chi Minh City, Viet Nam**, pada tanggal **26 September s.d 1 Oktober 2016**. Pertemuan CCS didahului oleh Pertemuan *ASEAN Joint Coordinating Committee on **Medical Practitioners*** (AJCCM), *ASEAN Joint Coordinating Committee on **Dental Practitioners*** (AJCCD), dan *ASEAN Joint Coordinating Committee on **Nursing*** (AJCCN) yang dilaksanakan secara paralel pada tanggal 26 s.d. 27 September 2016, Pertemuan *ASEAN **Healthcare Services Sectoral Working Group*** (HSSWG) pada tanggal 28 September 2016, serta Pertemuan *ASEAN **Coordinating Committee on Services*** (CCS) tanggal 29 September s.d. 1 Oktober 2016. Delri dari Sektor Kesehatan dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan. Pertemuan **AJCCM** dihadiri oleh Ketua Divisi Registrasi Konsil Kedokteran, KKI dan Kepala Bagian Kerja Sama Kesehatan Regional Biro Kerja Sama Luar Negeri, Setjen. Pertemuan **AJCCD** dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan, Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Luar Negeri Pusrengun Badan PPSDMK, Ketua Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran Gigi, KKI dan perwakilan Biro Kerja Sama Luar Negeri, Setjen. Pertemuan **AJCCN** dihadiri Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Badan PPSDMK, perwakilan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan BPPSDMK dan perwakilan Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Pertemuan **HSSWG** dihadiri oleh semua Delri Kemenkes termasuk perwakilan KKI dan PPNI, sedangkan pertemuan **CCS** dihadiri oleh Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM, PPSDMK dan Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kesehatan.

1. Pertemuan ASEAN Joint Coordinating Committee on Medical Practitioners (AJCCM), 26 s.d. 27 September 2016

Pertemuan AJCCM dipimpin oleh *Dr. Soulivanh Pholsena, Head of International Relation Division and Secretary of the Minister, Ministry of Health, Lao PDR* dan dihadiri oleh perwakilan seluruh ASEAN Member States (AMS) dan Sekretariat ASEAN.

Agenda utama pertemuan antara lain pembahasan *workplan* AJCCM 2016-2025 dan AJCCM *database*, dengan capaian antara lain sebagai berikut:

- a. Pertemuan melakukan *review* terhadap *workplan* AJCCM 2016-2025 dan menyepakati 7 *specific action lines* (SAL) yaitu (i) **Mechanism of Mobility for ASEAN Doctors (2017)**, (ii) **Temporary Registration and Guidelines (2018)**, (iii) **Full Registration Definition (2020)**, (iv) **Ensuring Safe and Quality Services**, (v) **Core Competencies / Curriculum**, (vi) **Aesthetic Medicine and Stem Cell Therapy**, dan (vii) **ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF)**.
- b. *Update* informasi terkait *Comparison Matrices on Important Elements of the Implementation Plans*, *AJCCD Statistical Database*, dan *National PMRA Website*. Pertemuan juga menyepakati usulan Indonesia untuk meng-*upload* 9 (sembilan) elemen AJCCM kedalam *ASEAN Healthcare Services Website* yang telah selesai di bangun oleh Indonesia.

2. Pertemuan ASEAN Joint Coordinating Committee on Dental Practitioners (AJCCD), 26 s.d. 27 September 2016

Pertemuan AJCCD di pimpin oleh *Dr. Aloungnatheth Sitthipanh, Vice President of Lao Dental Association, Ministry of Health of Lao PDR* dan dihadiri oleh seluruh perwakilan AMS serta Sekretariat ASEAN.

Agenda pertemuan antara lain pembahasan *workplan* AJCCD 2016-2025, AJCCD *database*, dan keketuaan AJCCD tahun berikutnya. *Workplan* AJCCD 2016-2025 : (i) **Harmonisation of standards in general dental practice (2020)**, (ii) **ASEAN Minimum Common Competency Standards for Dental Undergraduate Education (2020)**, dan (iii) **Mechanism of mobility for health professionals for each ASEAN Member States under ASEAN MRAs (2017)**.

3. Pertemuan ASEAN Joint Coordinating Committee on Nursing (AJCCN), 26 s.d. 27 September 2016

Pertemuan AJCCN di pimpin oleh *Dr. Bounpheng Philavong, Ministry of Health Lao DPR* dan dihadiri oleh seluruh AMS dan perwakilan Sekretariat ASEAN. Pertemuan membahas beberapa agenda antara lain *workplan* AJCCN 2016-2025, perubahan *Nursing Regulatory Authority (NRA)*, dan *AJCCN database* dengan capaian sebagai berikut :

Pertemuan melakukan *review* dan menyepakati *workplan* AJCCN 2016-2025 serta menyusun kegiatan tahunan untuk setiap *specific action line (SAL)* sbb:

- i. *Review of National Competencies for Nurses against the agreed 5 ASEAN Nursing Common Core Competencies,*
- ii. *Share the experience on the harmonisation process of nursing core competencies and encourage the Member States who have not done so, to harmonise their nursing core competencies at national level,*
- iii. *Map the nursing competency at basic professional levels in each AMS to National Qualification Framework (NQF),*
- iv. *Review and share the individual country Nursing Curriculum through mapping of AMS Nursing Curriculum,*
- v. *Strengthening/Developing the individual country Nursing Curriculum through mapping of AMS Nursing Curriculum,*
- vi. *Define and share the mechanism of mobility for health professionals for each ASEAN Member States under ASEAN MRAs, including identifying the challenges (Policy, Management & Leadership, Human Resource, Monitoring & Evaluation, Facility),*
- vii. *Prepare a flowchart to explain the mechanism in each ASEAN Member States to accept nurses from other ASEAN Member States,*
- viii. *Sharing information and best practices in CPD (Continuing Professional Development) on nursing, dan*
- ix. *Strengthening/Establishing national networking between the NRA with nursing educational institutions and relevant agencies in AMS.*

4. Pertemuan ASEAN Healthcare Services Sectoral Working Group (HSSWG), 29 September 2016

Pertemuan HSSWG di pimpin oleh *Dr. Bounpheng Philavong, Ministry of Health Lao DPR* dan dihadiri oleh seluruh AMS dan perwakilan Sekretariat ASEAN.

Pertemuan membahas Hasil pertemuan AJCCN, AJCCM, dan AJCCD, *Workplan* HSSWG 2016-2025, *ASEAN Healthcare Services Website* dan *Secretariat* dan Keketuaan HSSWG dan AJCCs berikutnya.

Pertemuan membahas *workplan* HSSWG 2016-2025 dan melakukan sedikit revisi terhadap *workplan* dimaksud, yaitu dengan menghapus SAL “*Regular review of the Workplan*” mengingat hal tersebut telah masuk kedalam *Strategic Action Plan (SAP) AEC Blueprint 2016-2025*.

Sehubungan dengan *workplan ASEAN Joint Coordinating Committee on Dental Practitioners*, khususnya terkait *Mechanism of Mobility for Health Professionals*, CCS membahas usulan beberapa negara anggota ASEAN mengenai penghapusan persyaratan bahasa nasional pada ujian kualifikasi profesi bagi dokter, dokter gigi dan perawat ASEAN. Dalam hal ini, beberapa AMS keberatan atas usulan tersebut. Kemampuan berbahasa lokal sangat diperlukan bagi seorang dokter pada saat melakukan anamnesa, diagnosa, dan pengobatan pasien guna menjamin *patient safety* dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada pasien. Pertemuan menyepakati untuk mengangkat isu ini ke *Senior Economic Ministers Meeting (SEOM)*.

Terkait Strategic Measure 110 (*Promote sectors with high growth potential such as health tourism and e-healthcare services, which will not have negative impact on the health care system of each AMS*), Filipina menyampaikan *concept note* mengenai “*Improving Healthcare through Shared e-Health Standards and Structures for the ASEAN Member States*”. Terhadap usulan tersebut, beberapa negara anggota ASEAN menyampaikan keberatannya atas proposal yang diajukan oleh Filipina karena adanya kekhawatiran akan terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan informasi pasien. Pertemuan meminta seluruh negara anggota ASEAN untuk menyusun *concept note* terkait *e-Health* yang akan dikembangkan di masing-masing negara dan mempresentasikan di pertemuan HSSWG berikutnya guna mengelaborasi kemungkinan mencari kesamaan konsep *e-Health* diantara AMS, untuk kemudian mengadopsi konsep dimaksud sebagai rujukan di regional ASEAN.

5. Pertemuan *Coordinating Committee on Services (CCS)*, 29 September s.d. 1 Oktober 2016

Pertemuan CCS di pimpin oleh Ms. Uma Muniandy, *Senior Assistant Director, Ministry of Trade and Industry of Singapore* dan dihadiri oleh seluruh perwakilan AMS serta *ASEAN Secretariat*.

Agenda pertemuan antara lain *ASEAN Economic Blueprint 2025*, *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)*, *ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)*, perkembangan kerjasama *working group* di bawah koordinasi CCS, *ASEAN Qualification Reference Framework (AQR)*.

1. Perkembangan negosiasi *ASEAN Economic Blueprint 2025*, *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)* Paket 10

Hingga saat ini hanya Singapura dan Thailand yang telah memenuhi *threshold* AFAS sementara 8 negara anggota ASEAN lainnya (Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina dan Vietnam) belum dapat memenuhinya. Dalam kaitan ini pertemuan sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan terhadap proposal Indonesia terkait dengan alternatif formulasi perhitungan penyelesaian komitmen AFAS Paket 10 dan memfokuskan pembahasan mengenai bagaimana menyelesaikan komitmen AFAS Paket 10 pada tahun 2017 sesuai dengan mandat Menteri Ekonomi ASEAN pada pertemuan *ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM)* ke-47 bulan Agustus 2015. AFAS Paket 10 kiranya dapat berlaku efektif per tanggal 31 Desember 2017 demi menjaga kredibilitas ASEAN.

2. Perkembangan pembahasan *draft text ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)*

Guna menindaklanjuti arahan SEOM 3/47 bulan Juni 2016, Sekretariat ASEAN telah menyusun *scoping paper* mengenai *ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA) : Options and Issues for Further Work Related to Elements of Negative List Approach and AEC Blueprint 2025*.

Beberapa elemen *negative list approach* yang dibahas antara lain: *Architectural Linkage between ATISA and ACIA*; *Negative list commitments which will only enter into force X years after signing of the ATISA*; *Textual provisions under ATISA to reflect negative list approach*; *Scheduling of Annex 1 (standstill) of the ATISA Reservation Lists will be given longer time*.

3. Perkembangan pembahasan *ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF)*

ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) merupakan sebuah kerangka rujukan umum (*common reference framework*) untuk memfasilitasi perbandingan tingkatan kualifikasi tenaga profesional di antara negara ASEAN guna mendukung pengakuan kualifikasi dan membangun kepercayaan suatu negara terhadap kualitas individu seorang tenaga profesional.

Mekanisme yang dilakukan dalam AQRF adalah membandingkan kerangka kualifikasi nasional dengan kerangka kualifikasi ASEAN berdasarkan *learning outcome* yang dihasilkan dari setiap tingkatan. Dapat disampaikan bahwa saat ini Indonesia memiliki 9 tingkatan di dalam *National Qualification Framework (NQF)*.

Dokumen AQRF *Governance and Structure* telah di-endorse oleh *ASEAN Labour Ministerial Meeting (ALLM)* pada Pertemuan ALLM ke-24 tanggal 15 Mei 2016 di Laos; *ASEAN Education Ministers Meeting (ASED)* pada Pertemuan ASED ke-9 tanggal 27 Mei 2016 di Malaysia dan *ASEAN Economic Ministers (AEM)* pada Pertemuan AEM ke-48 tanggal 3 Agustus 2016 di Laos.

3. Pertemuan SOM-3 APEC Bidang Kesehatan

Pertemuan SOM-3 APEC Bidang Kesehatan telah dilaksanakan di Lima, Peru, tanggal 15-22 Agustus 2016. Delegasi RI pada pertemuan tersebut terdiri dari: Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Direktur Penilaian Alkes dan PKRT beserta Kasubdit Alkes C & D; Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga beserta Kasubdit Kapasitas Kerja; Kabag Kerja Sama Regional Biro KSLN, BPOM; dan Staf Biro KSLN Kemenkes.

1. *Life Sciences Innovation Forum (LSIF) Regulatory Harmonization Steering Committee (RHSC)*, tanggal 15-17 Agustus 2016

Pertemuan dipimpin oleh RHSC *Co-Chairs*: Michelle Limoli (US), Toshi Tominaga (Japan) dan He Li (China), serta dihadiri oleh Chile, China, Indonesia,

Japan, Korea, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Singapore, Chinese Taipei, USA, AHC, *R-b Pharmaceutical Industry Coalition*, *Biologics Industry Coalition*, *Medical Device Industry Coalition*, *Parenteral Drug Industry Coalition*, *LSIF Advisor*, dan kandidat CoE dari akademisi (PKU, NUS, *Northern Eastern University*, *Seoul University*). Delegasi RI diwakili oleh Direktur Penilaian Alkes dan PKRT beserta staf, Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Kabag Kerja Sama Regional Biro KSLN BPOM, dan Staf Biro KSLN Kemenkes.

Secara garis besar, pertemuan membahas update perkembangan *Pilot Center of Excellence (CoE)* dari 6 *Priority Work Areas (PWA)* di RHSC, yaitu: *Multi-Regional Clinical Trial (MRCT)* dan *Good Clinical Practices (GCP)*, *Biotechnological Product*, *Good Registration Management (GRM)*, *Cellular Therapies*, *Pharmacovigilance*, dan *Global Supply Chain Integrity*. Selain itu, pertemuan membahas beberapa dokumen terkait CoE yaitu: *CoE Operating Model*, *CoE Operating Guideline*, *Step to formalize a CoE*, *CoE Application Form*, *CoE Pilot Endorsement Letter*, *CoE Formal Endorsement Letter* dan *CoE MoU*, untuk difinalisasi dan di-endorse pada pertemuan yang akan datang.

2. Life Sciences Innovation Forum (LSIF) Planning Group (PG) Meeting, tanggal 18 Agustus 2016

Pertemuan dipimpin oleh *Acting LSIF Chair*, Michelle Limoli (US) dan dihadiri oleh perwakilan Ekonomi APEC dari Australia, Canada, Chile, China, Indonesia, Korea, Philippines, Singapore, Chinese Taipei, Thailand, USA, perwakilan AHC dan ABAC. Delegasi RI diwakili oleh Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Kabag Kerja Sama Regional Biro KSLN BPOM, dan Staf Biro KSLN Kemenkes.

Pertemuan meng-endorse *Global Data Standard for Medical Products*, yang sebelumnya telah diajukan oleh perwakilan ABAC di LSIF RHSC, berupa penerapan *pilot project* yang diikuti oleh beberapa industri farmasi (AbbVie, Allergan, Amerisource Bergen, Amgen, Johnson & Johnson Supply Chain, Eli Lilly, Merck, Novartis) dan beberapa Negara (Philippines dan USA).

3. *Healthy Women, Healthy Economies (HWHE) Implementation Workshop: From Vision to Action*, tanggal 17-18 Agustus 2016

Workshop dibuka oleh Mario Rios Espinoza, Wakil Menteri Perempuan dan Populasi Berisiko, Peru, dan dihadiri oleh anggota Ekonomi/Negara APEC: Australia, Jepang, Malaysia, Mexico, Indonesia, Filipina, Peru, Chinese Taipei, Amerika Serikat, Viet Nam, serta industri dan sektor swasta. *Workshop* merupakan *cross-fora workshop* melibatkan: *Health Working Group (HWG)*, *Policy Partnerships on Science Technology and Innovation (PPSTI)*, dan *Human Resource Development Working Group (HRDWG)*. Workshop terselenggara atas dukungan dari USAID dan US-ATAARI.

Workshop ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan APEC HWHE: *Experts Group Meeting* di Manila tanggal 24-25 Agustus 2015, yang telah menghasilkan *HWHE Policy Toolkit* yang berfokus pada 5 komponen/area, yaitu: *workplace health and safety*, *health awareness and access*, *sexual and reproductive health*, *gender-based violence*, dan *work/life balance*. Tujuan *workshop* adalah berbagi studi kasus, membuat rencana kerja, dan mengimplementasikan *HWHE Policy Toolkit*. *Workshop* juga memastikan bahwa pemerintah dan sektor swasta dapat terlibat dalam aksi yang telah teridentifikasi dalam *Toolkit*.

Indonesia c.q. **Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga** menjadi Pembicara pada sesi *Toolkit Area #1: Workplace Health and Safety Best Practice Examples*. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga menyampaikan program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) yang menjadi *best practice* promosi kesehatan perempuan di tempat kerja. Pada kesempatan tersebut, juga ditayangkan Video tentang Program Promosi Kesehatan di salah satu perusahaan Indonesia, yaitu PT. Shyang Yao Fung, sebagai implementasi GP2SP.

4. *2nd Health Working Group (HWG) Meeting*, tanggal 19-20 Agustus 2016

Pertemuan dipimpin oleh Dr. Victor Cuba, *Chair* (Peru) dan Ms. Maylene Beltran, *Vice Chair* (Philippines), dan dihadiri oleh perwakilan Ekonomi APEC, yaitu: Australia, Canada, Chile, China, Indonesia, Japan, Korea, Mexico, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Singapore, Chinese Taipei, United States, Viet

Nam, perwakilan LSIF dan perwakilan EPWG. Delegasi RI diwakili oleh Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekkes, Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga beserta staf, Kepala Bagian Kerja Sama Regional Biro KSLN BPOM, dan Staf Biro KSLN Kemenkes.

Pada agenda *implementation plan for the Roadmap of Working Towards a Healthy Asia-Pacific (HAP) 2020*, Philippines, dengan *assistance* LSIF, menyampaikan proposal tentang “the Alliance”. “The Alliance” merupakan gabungan multi-stakeholder (terdiri dari unsur pemerintah, para ahli industri, *health sciences*, *health economies* dan *health policy experts*, organisasi, dan komunitas) yang dibentuk untuk membantu Ekonomi mengimplementasikan HAP 2020 *Roadmap*. Terhadap hal ini, **Indonesia menyampaikan keberatannya karena mekanisme kerja “the Alliance” dinilai belum jelas dan melibatkan terlalu banyak stakeholders di luar APEC**. Untuk itu, diperlukan konsultasi nasional terlebih dahulu. Hal serupa juga disampaikan oleh Canada, Chile, Papua New Guinea, Australia, China dan Mexico. Menurut mereka, akan lebih baik bila dibentuk *small group* dalam HWG untuk *me-review gaps* dalam implementasi *Roadmap* yang sudah dan belum tercapai. Pertemuan memutuskan untuk menunda (*postpone*) *adoption* “the Alliance” sampai pertemuan HWG berikutnya di SOM-1 bulan Februari 2017.

5. HWG Policy Dialogue: Healthy Migrants towards Healthy Asia Pacific 2020

Pada hari kedua HWG, sore hari pukul 14.00-17.30, dilaksanakan HWG *Policy Dialogue* dengan tema *Healthy Migrants towards Healthy Asia Pacific 2020*. Pertemuan dihadiri oleh Ekonomi APEC, *International Organization for Migration* (IOM), PAHO/WHO. Delegasi RI pada pertemuan ini diwakili oleh Kemenlu. *Policy Dialogue* ini dinilai terlalu luas pembahasannya, mulai dari TKI, ABK, imigran gelap, *refugee*, *asylum seeker*, dan lain-lain, sehingga tidak fokus dan tidak menghasilkan kesimpulan. Sintesa dari pertemuan ini adalah berbagi *experience* dan *lessons learnt* terkait *policy framework* dalam membahas kesehatan para migran serta meningkatkan *multi-sectoral collaboration* dalam permasalahan kesehatan migran.

6. 6th APEC High Level Meeting on Health and the Economy (HLM-6), tanggal 21-22 Agustus 2016

HLM-6 dilaksanakan di Lima, Peru, tanggal 21-22 Agustus 2016. Tema HLM-6 adalah *“Advancing in the Implementation of the Healthy Asia Pacific 2020 to Support the 2030 Sustainable Development Goals”*. Pertemuan dibuka secara resmi oleh Menteri Kesehatan Peru, dan dihadiri oleh Menteri Kesehatan Chile, Japan, Malaysia, Peru, Philippines, Papua New Guinea, dan Vietnam; Wakil Menkes Chinese Taipei; *senior officials; academic and industry leaders, representatives of non-governmental and international organizations.*

- a. **Bapak Duta Besar LB/BP RI di Lima, Peru, H.E. Ari Moenir Soenanda, hadir dalam pertemuan ini mewakili Menteri Kesehatan RI.** Bapak Duta Besar, dengan didampingi oleh perwakilan KBRI Lima dan Kementerian Luar Negeri, menyampaikan *statement* pada Panel 1: *The common challenges facing HAP2020 implementation and the achievement of the SDG Health - Perspectives of APEC Economies.*
- b. Pertemuan menyepakati bahwa HLM-6 merekomendasikan *APEC Leaders and Ministers:*
- (1) *Note the importance of implementation of the HAP2020 Roadmap and the wide range of health initiatives underway in the HWG, LSIF, ABAC, and other APEC fora in support of the HAP2020 Roadmap.*
 - (2) *Welcome the establishment of a small group to explore innovative approaches to further implement the HAP2020 Roadmap, consistent with existing mechanisms and activities underway in this space.*
 - (3) *Welcome efforts to build more efficient and high-performing health systems by reducing waste, improving the quality of care, ensuring proper workforce planning, aiming for sufficient resources for health in domestic budgets, making high impact investments, and promoting public-private-academic partnerships. Call on APEC Economies to continue to work together to develop and share high-quality data in order to build the evidence base for policy development, effective health interventions, improved decision making, and impact measurement.*
 - (4) *Recognize the role of policy, regulatory, and legal frameworks in providing incentives for the discovery and development of new medicines and technologies; and support the cooperation among universities, public research institutions, and the private sector on life science innovations.*

(5) *Welcome future collaboration with Senior Finance Officials on the fiscal and economic impacts of ill-health. Call on APEC Health and Finance Senior Officials and key stakeholders to convene a formal cross-fora dialogue during 2017.*

C. Kesepakatan kerja sama luar negeri multilateral bidang kesehatan

1. Resolusi World Health Assembly of the World Health Organization ke-69

Sidang Sesi ke-69 *World Health Assembly* (WHA) telah berlangsung pada tanggal 23-28 Mei 2016 di Kantor PBB di Jenewa, Swiss.

Tema utama sidang WHA tahun 2016 ini adalah “*Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*”. Pemilihan tema ini antara lain dilatarbelakangi oleh diadopsinya *the new development agenda* “*Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*” pada sidang *United Nations General Assembly* tanggal 25 September 2015.

Sidang WHA 69 telah membahas 76 agenda *items/sub-items* baik isu teknis maupun non teknis dan menghasilkan 19 (sembilan belas) *Decision/Keputusan* dan 25 (dua puluh lima) *Resolution/Resolusi*.

Berikut 19 Keputusan Sidang WHA 69 :

1. WHA69(1) : *Composition of the Committee on Credentials*
2. WHA69(3): *Election of officers of the Sixty-ninth World Health Assembly*
3. WHA69(3) : *Election of officers of the main committees*
4. WHA69(4) : *Establishment of the General Committee*
5. WHA69(5): *Adoption of the agenda*
6. WHA69(6): *Verification of credentials*
7. WHA69(7) : *Election of Members entitled to designate a person to serve on the Executive Board*
8. WHA69(8): *Decision based on the agreed recommendations of the Open-ended Intergovernmental Meeting on Governance Reform (Geneva, 8 and 9 March 2016 and 28 and 29 April 2016)*
9. WHA69(9) : *Reform of WHO’s work in health emergency management:WHO Health Emergencies Programme*

10. WHA69(10) : *Health condition in occupied Palestinian territory, including east Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan*
11. WHA69(11): *Health and environment: draft road map for an enhanced global response to the adverse health effect of air pollution*
12. WHA69(12): *Report of the Commission on Ending Childhood Obesity*
13. WHA69(13) : *Strengthening synergies between the World Health Assembly and the Conferences of the Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control*
14. WHA69(14): *Implementation of the International Health Regulations (2005)*
15. WHA69(15): *Public health dimension of the world drug problem including in the context of the special session of the United Nations General Assembly on the world drug problem, held in April 2016*
16. WHA69(16): *Strategic budget space allocation*
17. WHA69(17): *Appointment of representatives to the WHO Staff Pension Committee*
18. WHA69(18): *Real estate: update of the Geneva buildings renovation strategy*
19. WHA69(19): *Selection of the country in which the Seventieth World Health Assembly would be held.*

Berikut 25 Resolusi yang dihasilkan :

1. WHA69.1 : *Strengthening essential public health functions in support of the achievement of universal health coverage*
2. WHA69.2 : *Committing to implementation of the Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents' Health*
3. WHA69.3 : *The Global strategy and action plan on ageing and health 2016–2020: towards a world in which everyone can live a long and healthy life*
4. WHA69.4 : *The role of the health sector in the Strategic Approach to International Chemicals Management towards the 2020 goal and beyond*
5. WHA69.5 : *WHO global plan of action to strengthen the role of the health system within a national multisectoral response to address interpersonal violence, in particular against women and girls, and against children*
6. WHA69.6 : *Prevention and control of noncommunicable diseases: responses to specific assignments in preparation for the third High-level Meeting of the United Nations General Assembly on the Prevention and Control of Non-communicable diseases in 2018*

7. WHA69.7 : *Addressing the challenges of the United Nations Decade of Action for Road Safety (2011–2020): outcome of the second Global High-level Conference on Road Safety – Time for Results*
8. WHA69.8 : *United Nations Decade of Action on Nutrition (2016-2025)*
9. WHA69.9 : *Ending inappropriate promotion of foods for infants and young children*
10. WHA69.10 : *Framework of engagement with non-State actors*
11. WHA69.11 : *Health in the 2030 Agenda for Sustainable Development*
12. WHA69.12 : *WHO programmatic and financial report for 2014–2015 including audited financial statements for 2015*
13. WHA69.13 : *Status of collection of assessed contributions, including Member States in arrears in the payment of their contributions to an extent that would justify invoking Article 7 of the Constitution*
14. WHA69.14 : *Scale of assessments for 2017*
15. WHA69.15 : *Report of the External Auditor*
16. WHA69.16 : *Salaries of staff in ungraded posts and of the Director-General*
17. WHA69.17 : *Amendments to the Staff Regulations: dispute resolution*
18. WHA69.18 : *Process for the election of the Director-General of the World Health Organization*
19. WHA69.19 : *Global strategy on human resources for health: workforce 2030*
20. WHA69.20 : *Promoting innovation and access to quality, safe, efficacious and affordable medicines for children*
21. WHA69.21 : *Addressing the burden of mycetoma*
22. WHA69.22 : *Global Health Sector Strategies on HIV, Viral Hepatitis and Sexually Transmitted Infections, 2016-2021*
23. WHA69.23 : *Follow-up of the report of the Consultative Expert Working Group on Research and Development: Financing and Coordination*
24. WHA69.24 : *Strengthening integrated, people-centred health services*
25. WHA69.25 : *Addressing the global shortage of medicines and vaccines*

2. Jakarta Call for Action (GHSA Action Package Coordination Meeting)

GHSA Action Package Coordinating Meeting dilaksanakan pada tanggal 23-25 Agustus 2016 di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta.

Pada pertemuan tersebut menyepakati dokumen Jakarta Call for Action untuk mengimplementasi Action Package GHSA.

Sesuai dengan sasaran strategis Biro Kerja Sama Luar Negeri yaitu meningkatnya peran dan posisi Indonesia dalam kerja sama luar negeri bidang kesehatan, maka substansi 9 dokumen kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan tersebut diatas, diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yaitu meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri, dengan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah pusat terkait politik luar negeri.

Pencapaian kinerja pada tahun 2016, antara lain didukung oleh suksesnya Kementerian Kesehatan melalui Biro Kerja Sama Luar Negeri dalam menyelenggarakan pertemuan internasional, yaitu :

a. **Pertemuan *The 1st Meeting of ASEAN Health Cluster 1 : Promoting Healthy Lifestyle***

Dalam rangka Indonesia sebagai *Lead Country ASEAN Health Cluster 1*, pada tanggal 17 - 20 Juli 2016 telah diselenggarakan *The 1st Meeting of ASEAN Health Cluster 1 : Promoting Healthy Lifestyle*. Pertemuan tersebut bertujuan **menyusun work plan Health Cluster 1** dan menyepakati mekanisme operasionalisasi kegiatan *cluster* pada periode transisi 2016 - 2017 dan paska transisi 2017 - 2020. Dokumen **Rencana Kerja/Work Plan ASEAN Health Cluster 1** adalah dokumen **ASEAN** setingkat **Renstra** yang memuat **regional strategy, target, proposed activities** dan **expected output** beserta **indikator** untuk masing-masing **health priority** selama **periode 2016–2020**.



Gambar 2
The 1st Meeting of ASEAN Health Cluster 1 : Promoting Healthy Lifestyle
Medan, 17-20 Juli 2016

Hasil yang dicapai pada pertemuan tersebut adalah :

Output pertemuan berupa draft *work plan ASEAN Health Cluster 1* yang selanjutnya akan dilaporkan dan disahkan pada pertemuan SOMHD ke-11 di Brunei Darussalam.

Pertemuan **menyepakati *Strategy Cluster 1* dan *health priority regional strategy*** sbb:

Cluster Strategy: Strengthen capability, capacity, and advocacy in addressing risk factors and their related diseases, and other relevant conditions affecting the health of the ASEAN people by promoting healthy lifestyle throughout the life course

Health Priority Regional Strategy /Sub-strategies:

- a. Strengthen capacity, and capability in promoting healthy lifestyle, mental health, preventing injury, active ageing and reducing risk factors which include tobacco, alcohol, physical inactivity, unhealthy diet, malnutrition, and hazards at workplace;*
- b. Promote cost effective intervention packages for NCD and conditions related to risk factors;*
- c. Strengthen advocacy, networking, and sharing of information/good practices/experiences among AMS in reducing risk factors for various age groups and settings;*

Develop strong monitoring and evaluation mechanism on the implementation of the regional strategies in promoting healthy lifestyle

b. Pertemuan Global Health Security Agenda (GHSA) Action Package Coordination Meeting

Pertemuan Global Health Security Agenda (GHSA) Action Package Coordination Meeting telah dilaksanakan pada tanggal 23-25 Agustus 2016 di Jakarta. Pertemuan diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Ketua Steering Group GHSA di tahun 2016.

Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk memperkuat koordinasi antar Negara-negara anggota GHSA dalam implementasi 11 Action Package GHSA, serta berbagi informasi, pengalaman, best practices, tantangan dan solusi dalam implementasinya.

Hasil pertemuan tersebut sebagai berikut :

1. Perlunya One Health untuk terus direalisasikan;

2. Perlunya tindak lanjut ToR koordinasi untuk dapat diangkat pada pertemuan tingkat Menteri di Belanda;
3. Perlunya langkah-langkah lanjutan agar AP Coordination dapat menjadi footprint Indonesia; dan
4. Pentingnya koordinasi lintas K/L yang lebih intensif agar kepemimpinan Indonesia dalam GHSA dapat bermakna dan bermanfaat, baik untuk masyarakat nasional maupun internasional. Berbagai pengakuan atas kepemimpinan Indonesia dapat menjadi pendorong untuk program yang lebih nyata bagi masyarakat.



Gambar 3
Pertemuan Global Health Security Agenda (GHSA)
Action Package Coordination Meeting
Jakarta, 23-25 Agustus 2016

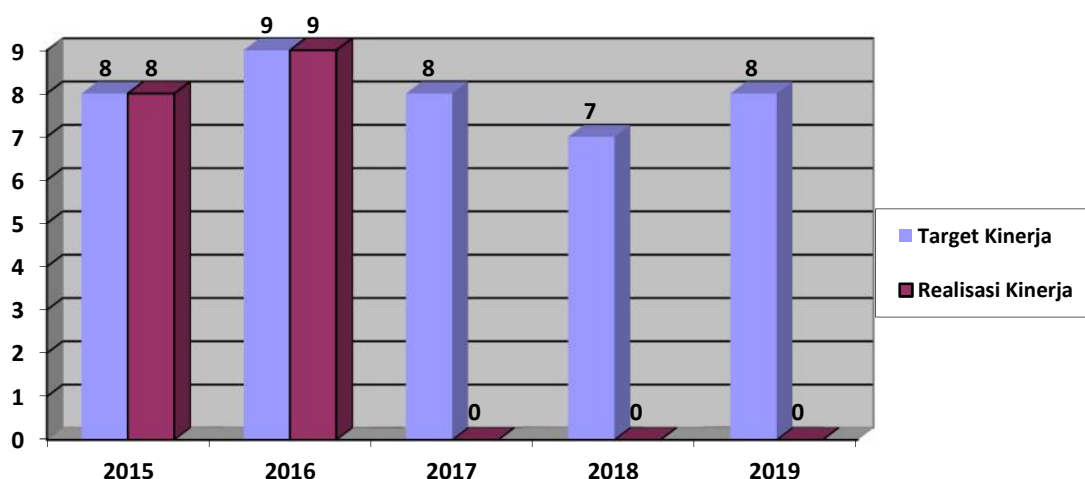
Perbandingan capaian kinerja kegiatan Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri tahun dari 2015-2019 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 7
Capaian Target Kinerja Tahun 2015 – 2019
Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri

No.	Indikator	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri bidang kesehatan	Target : 8 Realisasi : 8 (100%)	Target : 9 Realisasi : 9 (100%)	Target : 8	Target : 7	Target : 8

Berdasarkan tren kinerja sejak tahun 2015 sampai dengan 2019, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja dalam periode jangka menengah tahun 2015-2019 dapat dicapai, sebagaimana disajikan pada grafik di bawah ini :

Grafik 1
Target Kinerja dan Realisasi Kinerja sesuai Renstra
Kementerian Kesehatan 2015 - 2019



B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Biro Kerja Sama Luar Negeri pada tahun 2016 sebesar Rp. 19.547.063.000 sesuai dengan DIPA Biro Kerja Sama Luar Negeri No.SP DIPA-024.01.1.648428/2016 dengan rincian belanja barang sebesar Rp. 19.442.063.000 dan belanja modal sebesar Rp. 105.000.000.

Pada bulan Juli 2016, sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan terkait efisiensi anggaran, Biro Kerja Sama Luar Negeri melakukan efisiensi sebesar Rp. 919.038.000 sehingga dilakukan revisi DIPA menjadi Rp. 18.628.025.000.

Pada bulan Agustus 2016, Biro Kerja Sama Luar Negeri melakukan efisiensi lagi sebesar Rp. 4.520.137.000 sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan, sehingga dilakukan revisi DIPA menjadi Rp. 14.107.888.000.

Pada bulan September 2016, Biro Kerja Sama Luar Negeri melakukan *self blocking* (blokir mandiri) sebesar Rp. 3.738.225.000, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016, sehingga anggaran yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 10.369.663.000.

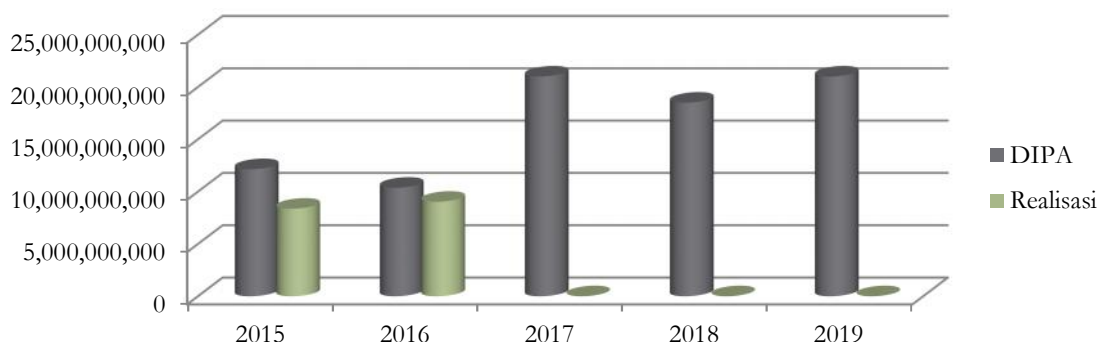
Tabel 8
Perbandingan DIPA dan Realisasi Tahun 2015 - 2019
Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri

(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	DIPA	Realisasi	Presentase
Tahun 2015	12.145.931.000	8.366.939.371	68.89 %
Tahun 2016	10.369.663.000	9.029.049.328	87.07 %
Tahun 2017	21.000.000.000	0	0 %
Tahun 2018	18.500.000.000	0	0 %
Tahun 2019	21.000.000.000	0	0 %

Sumber : Aplikasi SPAN Kementerian Keuangan dan Renstra Kemenkes 2015-2019

Grafik 2
Perbandingan DIPA dan Realisasi Tahun 2015 – 2019
Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri



Sesuai dengan Laporan Keuangan Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016, realisasi anggaran Biro Kerja Sama Luar Negeri sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar 64.00% dari pagu Rp. 14.107.888.000 yang didalamnya termasuk anggaran *self blocking*. Dan apabila menggunakan pagu Rp. 10.369.663.000, maka realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 9.032.199.328 atau 87.07%.

Sisa anggaran Biro Kerja Sama Luar Negeri pada tahun 2016 sebesar Rp. 5.078.838.672, yang didalamnya termasuk anggaran *self blocking* sebesar Rp. 3.738.225.000. Sisa anggaran yang murni dari kegiatan peningkatan kerja sama luar negeri sebesar Rp. 1.340.613.672 atau sebesar 9.50% dari total pagu Rp. 14.107.888.000.

Berdasarkan capaian kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2016, Biro Kerja Sama Luar Negeri telah mencapai 100%. Pada monitoring evaluasi kinerja penganggaran yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dalam aplikasi e-monev anggaran PMK 248, dinyatakan bahwa dari 5 output beserta keluarannya sesuai DIPA/POK Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun Anggaran 2016, telah mencapai 100% dengan nilai kinerja sebesar 87.41%. Kelima output tersebut adalah :

1. Kesepakatan kerja sama luar negeri bilateral bidang kesehatan
2. Kesepakatan kerja sama luar negeri regional bidang kesehatan
3. Kesepakatan kerja sama luar negeri multilateral bidang kesehatan
4. Dukungan layanan manajemen
5. Layanan Perkantoran

Tabel 8
Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2016

No.	Nama Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Capaian	%
1	Kesepakatan kerja sama luar negeri bilateral bidang kesehatan (Dokumen implementasi)	4.746.983.000	2.464.214.115	51.91%	4	4	100%
2	Kesepakatan kerja sama luar negeri regional bidang kesehatan (Dokumen kesepakatan)	2.991.210.000	1.528.933.845	51.11%	3	3	100%
3	Kesepakatan kerja sama luar negeri multilateral bidang kesehatan (Dokumen kesepakatan)	4.025.335.000	3.287.479.247	81.67%	2	2	100%
4	Dukungan layanan manajemen (Dokumen)	796.260.000	574.534.253	72.15%	8	8	100%
5	Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)	1.548.100.000	1.173.887.868	75.82%	12	12	100%

Dari tabel capaian kegiatan tersebut di atas, berikut hasil-hasilnya :

No.	Nama Output	Hasil Kegiatan
1	Kesepakatan kerja sama luar negeri bilateral bidang kesehatan (Dokumen implementasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pengaturan Pelaksanaan Penelitian Penyakit Menular RI-AS/IA NIH RI – USA 2. <i>Individual Arrangement (IA) Assistance Agreement</i> No. 497-AA-030 (AA 030) RI-USAID 3. MoU Kerja Sama Kementerian Kesehatan RI - INGO AIDS Healthcare Foundation (AHF) 4. MoU Kerja Sama Kementerian Kesehatan RI – INGO Hellen Keller International (HKI)
2	Kesepakatan kerja sama luar negeri regional bidang kesehatan (Dokumen kesepakatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Workplan The 2nd Meeting of ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle</i> 2. <i>The 85th Meeting of the ASEAN Coordinating Committee on Services and other Related Meetings</i> 3. Rangkaian <i>Third Senior Officials' Meeting (SOM-3)</i> APEC 2016
3	Kesepakatan kerja sama luar negeri multilateral bidang kesehatan (Dokumen kesepakatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resolusi <i>World Health Assembly of the World Health Organization</i> ke-69 2. Jakarta Call for Action GHSA
4	Dukungan layanan manajemen (Dokumen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri TA 2016 2. Laporan Keuangan Biro Kerja Sama Luar Negeri TA 2016 3. Dokumen Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2015 4. Dokumen Kontrak Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2016 5. Dokumen RKA-K/L BKSLN Tahun 2016 6. Dokumen Renja-K/L Tahun 2017 7. Laporan BMN Tahun 2015 8. Dokumen Perencanaan TA 2017
5	Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)	

Pencapaian kinerja tersebut di atas, terkait langsung dengan sumber daya yang tersedia di Biro Kerja Sama Luar Negeri, khususnya pembiayaan pelaksanaan kegiatan.

Seperti diuraikan sebelumnya, dibalik terpenuhinya target jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan yang diimplementasikan pada tahun 2016, terdapat sejumlah kegiatan atau upaya yang telah dilakukan sebagai pendukung keberhasilan tersebut, yaitu :

- 1) Keberhasilan Indonesia atau Kementerian Kesehatan menyelenggarakan pertemuan internasional.
- 2) Komitmen pimpinan nasional dan Kementerian Kesehatan untuk mengikuti perkembangan isu-isu internasional, terutama terkait bidang kesehatan.
- 3) Tersedianya dukungan pembiayaan yang cukup.

Meskipun hasilnya cukup baik, sejumlah tantangan masih perlu menjadi perhatian Kementerian Kesehatan. Tantangan tersebut adalah :

- 1) Dinamika internasional berlangsung dengan sangat cepat, khususnya perkembangan isu-isu politik dan ekonomi. Kesehatan merupakan isu yang tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh perkembangan isu-isu lainnya di dunia internasional.
- 2) Sumber daya manusia di Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi untuk berkontribusi di forum internasional masih terbatas. Ini akan berpengaruh pada mutu kesepakatan internasional yang dihasilkan.
- 3) Masih belum optimalnya koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait kerja sama internasional di bidang kesehatan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan kementerian atau lembaga terkait, terutama Kementerian Luar Negeri untuk mengetahui peta politik dan ekonomi di dunia internasional.
- 2) Memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia di Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kompetensinya, termasuk melalui pemberian kesempatan mengikuti kegiatan internasional.
- 3) Terus meningkatkan koordinasi, baik di internal Kementerian Kesehatan maupun di lingkup nasional.

Dari segi anggaran, Kementerian Kesehatan dalam kerja sama internasional telah melakukan efisiensi tanpa mengurangi capaian kinerja, diantaranya dengan cara :

- 1) Disela-sela menghadiri Sidang WHA, pertemuan tahunan negara-negara organisasi WHO, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan pertemuan Side-Event Bilateral dengan negara-negara sahabat sesama anggota WHO, untuk membicarakan kemungkinan kerja sama yang bisa dijalin antara Indonesia dan negara sahabat. Hal ini dapat menghemat anggaran, karena tidak perlu menyelenggarakan pertemuan bilateral tersendiri yang membutuhkan anggaran tidak sedikit.
- 2) Mengurangi jumlah delegasi pada pertemuan internasional, dengan menyusun delegasi pada setiap pertemuan internasional yang hanya mengikutsertakan unit kerja yang terkait.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016 menyajikan capaian strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja kegiatan. Berbagai keberhasilan dan kegagalan yang sudah dicapai ditentukan oleh adanya komitmen dan dukungan pimpinan. Selain itu dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2016.

Capaian kinerja tahun 2016 menjelaskan bahwa capaian kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri telah mencapai 100%. Beberapa permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal dalam mewujudkan capaian target kinerja, antara lain :

1. Belum tersedianya SOP atau mekanisme kerja pencapaian dokumen terimplementasi menjadi hambatan dalam menyelaraskan pelaksanaan kegiatan.
2. Kualitas SDM yang kurang memadai dalam menangani dan pemberian dukungan tugas-tugas Biro Kerja Sama Luar Negeri.
3. Kurangnya pelaksanaan kegiatan koordinasi pemantaun implementasi dokumen capaian kinerja.

B. SARAN/LANGKAH TINDAK LANJUT

1. Menyusun berbagai SOP atau mekanisme kerja terkait implementasi.
2. Meningkatkan kualitas pelatihan dan bimbingan teknis baik kepada jajaran Biro Kerja Sama Luar Negeri maupun jejaring instansi pemerintah lainnya.
3. Memperluas cakupan sosialisasi untuk lebih mendorong penguatan kelembagaan dan aktivitas kinerja.

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BIRO KERJASAMA LUAR NEGERI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Budi Dhewajani, MA

Jabatan : Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2016

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
NIP. 195810171984031004


Dra. Budi Dhewajani, MA
NIP. 196203031990032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BIRO KERJASAMA LUAR NEGERI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya peran dan posisi Indonesia dalam kerja sama luar negeri bidang kesehatan/peningkatan kerja sama luar negeri	1. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan	9 Kesepakatan

Kegiatan

1. Peningkatan kerja sama luar negeri

Anggaran

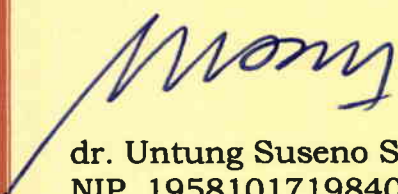
Rp19.547.063.000,-


Jakarta,

Januari 2016

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
NIP. 195810171984031004


Dra. Budi Dhewajani, MA
NIP. 196203031990032001